

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik dibentuk dengan langkah demi langkah bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat, baik sejauh kebutuhan penting dan kebutuhan yang berbeda, baik fisik maupun duniawi, menawarkan jenis bantuan di bidang pelatihan, kesejahteraan, keamanan , otorisasi hukum, transportasi umum, dan pengaturan pangan. Sumber-sumber kekayaan diperoleh dari beban dan kewajiban kewajiban publik, tunjangan organisasi negara, kredit pemerintah, serta pembayaran autentik lainnya dan sesuai undang-undang (Bastian, 2005). Sebagai bentuk organisasi yang kompleks organisasi sektor publik dewasa ini semakin dituntut guna meningkatkan akuntabilitas baik di lingkup pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi organisasi kepada publik yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009)

Berikut contoh akuntabilitas pemerintah terhadap publik yaitu adanya penyediaan laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan adalah informasi dengan berisikan aktivitas keuangan dan kinerja pemerintah didalamnya. Laporan keuangan disusun guna memberikan kebutuhan informasi dari seluruh pihak pengguna, bukan guna memberikan kebutuhan khusus dari pengguna (PP. 71, 2010). Pemerintah daerah wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan agar dapat dijadikan alat mendasar guna

dilakukan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, laporan keuangan yang tersaji harus bermanfaat, dan berkualitas sesuai dengan sifat kualitatif laporan keuangan yang dijelaskan dalam PP. No. 71 Tahun 2010.

Sistem pengendalian internal adalah siklus yang bergabung dengan kegiatan dan latihan administrasi asosiasi dan semua perwakilan yang diselesaikan secara tiba-tiba dan responsif terhadap kasus-kasus tertentu serta nonstop. Sistem ini dibentuk oleh kepala pemerintahan guna mengembangkan kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas pengelolaan finansial pemerintah secara menyeluruh (UU. No. 1, 2004). Kemudian kepala daerah/pengguna anggaran wajib mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Sistem Pengendalian Internal yang memadai serta memastikan siklus akuntansi telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

Pengertian SAP adalah suatu prinsip akuntansi yang digunakan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam PP. No. 71 tahun 2010. Dalam SAP dijelaskan beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan yang keuangan antara lain; 1) Basis Akuntansi Akrua dan Kas, 2) Nilai Historis, yakni dicatat sebesar kas / setara kas yang disetorkan/diharapkan, 3) Realisasi, pendapatan dan belanja diakui setelah otorisasi melalui anggaran, 4) Substansi mengungguli bentuk formal, penyajian wajar harus sesuai dengan substansi dan tidak semata mata aspek formalitas saja, 5) Periodisitas, disajikan dalam periode periode, 6) Konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama, dan 7) Penyajian Wajar. Jika laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah telah memenuhi prinsip prinsip yang tertuang dalam SAP, maka informasi yang tersaji dapat diandalkan sehingga dapat dipublikasikan dan digunakan oleh penggunanya.

Salah satu bentuk akuntabilitas yang penting diterapkan pemerintah daerah adalah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pengertian SIKD merupakan sebuah kerangka guna mencatat, mengarahkan, dan mengukur informasi laporan keuangan daerah dan informasi penting lainnya kedalam data. guna diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan dapat dijadikan alat pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP. 65, 2010). Fungsi SIKD digunakan sebagai alat monitoring dan mengevaluasi kebijakan yang digunakan dalam satu periode fiskal. Jika SIKD dapat diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, maka akan diperoleh suatu kebijakan yang baik pula bagi pemerintah sehingga penyusunan laporan keuangan dan hasil informasi yang tersaji dapat lebih berkualitas.

Guna memastikan kualitas dari laporan keuangan, perlu dilakukan suatu proses audit (pemeriksaan) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam prosesnya, BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan pada keuangan, namun juga melakukan audit atas kinerja manajemen. Hasil audit laporan keuangan, dinyatakan dengan pemberian opini, sedangkan hasil audit kinerja dinyatakan dengan penerbitan laporan atas kepatuhan (jika ditemukan ketidakpatuhan). Standar pelaporan hasil pemeriksaan yang disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam laporan audit bahwa penyusunan laporan keuangan telah mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Menjelaskan temuan kepatuhan prinsip akuntansi yang diterapkan pada penyajian laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, jika ada.

3. Dalam laporan keuangan, pengungkapan informatif dianggap memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4. Pemberian opini dalam laporan auditor terhadap laporan keuangan secara keseluruhan seperti jika pernyataan bahwa suatu pernyataan tidak dapat ditawarkan dan jika suatu masukan tidak dapat dikomunikasikan secara umum, alasannya harus jelas.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertuang temuan pemeriksaan yang dapat terdiri dari satu atau lebih kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting diungkapkan dikarenakan keefektifan dan pemahaman dalam penerapan SPI dapat mempengaruhi penentuan keputusan pemeriksaan. Oleh karena itu pemahaman SPI digunakan sebagai salah satu kriteria guna meneliti kewajaran suatu laporan keuangan oleh pemeriksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Dalam LHP berisi opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan LHP BPK Jatim yang diakses tanggal 26 Juli 2021, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sejak tahun 2011 2013 mendapat opini WTP, 2014 2016 Mendapat opini WDP, dan 2017 2020 mendapat opini WTP. Pada tahun 2017 Kabupaten Bangkalan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna tahun 2017 setelah 3 periode sebelumnya selalu bertahan di opini WDP. Hal tersebut merupakan pencapaian terbaik bagi kabupaten Bangkalan. Meskipun opini WTP telah diraihinya, pemeriksa melaporkan ada temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal sebanyak 9 kasus, dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

sebanyak 7 kasus. Sehingga total kasus yang dilaporkan sebanyak 16 kasus dan menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 7,8 Miliar, pemerintah Bangkalan adalah menyelesaikan kerugian yang disebabkan dari temuan tersebut di atas paling lambat 60 hari kerja. Angka ini tentu jauh lebih rendah daripada kerugian di periode sebelumnya yang mencapai Rp.68 Miliar.

Menurut penjabaran sebelumnya, faktor-faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah Sistem pengendalian internal dan kesesuaian penyusunan Laporan Keuangan dengan SAP. Berdasarkan fungsi, SPI tersebut digunakan guna mengawasi pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan berkualitas. Sedangkan SAP berisi prinsip atau aturan yang harus diikuti pemerintah daerah pada saat menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan terhindar dari salah saji. Namun faktanya, laporan keuangan kabupaten bangkalan tetap dianggap berkualitas terbukti dengan perolehan opini WTP walaupun masih ditemukan kelemahan SPI dan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan

Armel (2017) mengungkapkan dalam jurnal penelitiannya yang dilaksanakan di OPD kota Dumai, bahwa teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan hubungannya positif. Semakin banyak Teknologi Informasi dimanfaatkan dalam proses pemerintahan, maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Berdasarkan pencapaian opini Kabupaten Bangkalan yang sudah baik namun masih ada catatan tentang SPI dan kepatuhan pada peraturan perundangan, peneliti tertarik guna mengetahui lebih jauh pengaruh dari keduanya. Peneliti juga menambahkan hal lain yang diasumsikan bisa

mempunyai pengaruh terhadap perolehan opini audit yang menandakan laporan keuangan berkualitas, seperti dalam penelitian Armel (2017) yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah kota Dumai tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas keuangan secara signifikan memberikan pengaruh positif secara signifikan. Oleh karena itu peneliti menyusun penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan?
2. Apakah temuan kepatuhan peraturan undang-undang berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan
2. Guna mengetahui apakah kepatuhan peraturan undang-undang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. Guna mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat:

1. Kepada organisasi perangkat daerah agar lebih memahami sistem pengendalian internal pemerintah
2. Memberikan pengetahuan bahwa patuh terhadap peraturan perundang-undangan itu penting guna memperoleh Laporan keuangan yang berkualitas